



KEPEMIMPINAN SANDIAGA UNO DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

SANDIAGA UNO'S LEADERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF TOURIST VILLAGES AS AN EFFORT TO IMPROVE COMMUNITY ECONOMY

Khaira Azzahra^{1*}, Dwi Afria Yelda², Hafiz Randika Putra³, Viola Nofrilia⁴
Yulia Hanoselina⁵

^{1*}Universitas Negeri Padang, Email: khairazzahra2005@gmail.com

²Universitas Negeri Padang, Email: dwiafria53@gmail.com

³Universitas Negeri Padang, Email: hafizrandikaputra@gmail.com

⁴Universitas Negeri Padang, Email: violanofrilia@gmail.com

⁵Universitas Negeri Padang, Email: yuliahanoselina@fis.unp.ac.id

*email koresponden: khairazzahra2005@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2757>

Abstrack

The development of tourism villages has become a key priority for the Indonesian government to drive rural economic recovery through tourism and creative industries. However, rural areas often face structural barriers such as limited human resource capacity and traditional management styles. Therefore, this study aims to examine the extent to which Sandiaga Uno's transformational leadership style influences creative policymaking and its impact on rural economic conditions. This study utilizes the Transformational Leadership Theory by Bass and Avolio (1994) as the analytical framework. The research employs a qualitative descriptive literature review method. Data collection techniques were conducted through documentary analysis, gathering information from written sources such as scientific journals, books, official policies, and secondary data from the Ministry of Tourism and Creative Economy. The findings indicate that by implementing a transformational leadership model, Sandiaga Uno significantly influences how tourism villages are promoted globally, generates new business opportunities for small and medium enterprises (MSMEs), creates local employment, and strengthens the rural creative economy ecosystem. Ultimately, a collaborative, adaptive, and visionary leadership model is the primary factor in achieving sustainable tourism village development and transforming rural economies across Indonesia.

Keywords: *leadership, Sandiaga, village development, tourism village, economy.*

Abstrak

Pengembangan desa wisata telah menjadi prioritas penting pemerintah Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, wilayah pedesaan kerap menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan cara



pengelolaan yang masih tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana gaya kepemimpinan transformasional Sandiaga Uno berpengaruh dalam menyusun kebijakan kreatif, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kondisi perekonomian di desa. Penelitian ini menggunakan landasan Teori Kepemimpinan Transformasional yang dikemukakan oleh Bass dan Avolio (1994). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumenter (documentary analysis) dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, kebijakan resmi, serta data sekunder yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan model kepemimpinan transformasional, Sandiaga Uno berhasil mempromosikan wisata desa secara luas, membuka peluang usaha baru untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja lokal, serta memperkuat sistem ekonomi kreatif di pedesaan. Kesimpulannya, kepemimpinan yang mampu beradaptasi, kreatif, dan kolaboratif menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan desa wisata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: kepemimpinan, sandiaga, pengembangan desa, desa wisata, perekonomian.

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata adalah salah satu bagian penting dalam struktur perekonomian nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan banyak pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai industri yang berdimensi luas, pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan daerah yang menyeluruh dengan memanfaatkan keunikan dan potensi setiap daerah pedesaan. Kebijakan pariwisata yang biasanya fokus pada pembangunan wisata dalam skala besar di kawasan perkotaan sering kali menciptakan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pikir menuju pariwisata yang berkelanjutan dan didasarkan pada masyarakat, yang terlihat dalam program pengembangan wisata desa.

Pembangunan nasional yang berfokus pada daerah pinggiran membutuhkan perubahan fungsi desa dari sekadar area administratif yang hanya mendukung produksi pangan menjadi pusat tumbuhnya ekonomi baru yang lebih produktif. Pengembangan desa wisata muncul sebagai bentuk alternatif dari pembangunan yang terpusat, dengan menggabungkan keindahan alam, kekhasan budaya, tradisi, serta kreativitas masyarakat menjadi satu sistem pengelolaan yang mandiri. Dengan pendekatan ini, komunitas desa diposisikan sebagai pusat utama yang mengendalikan jalur distribusi pariwisata di wilayahnya. Ketika desa bisa dikelola dengan baik dan profesional, sektor ini ternyata sangat efektif dalam mendorong berbagai kegiatan ekonomi pendukung, seperti berkembangnya industri kerajinan tangan, penyediaan akomodasi lokal, serta pelestarian berbagai jenis makanan tradisional.

Namun, kenyataan sosial dan struktural di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan potensi wisata desa di Indonesia sering kali terhambat oleh berbagai batasan kapasitas yang tersimpan. Banyak desa memiliki potensi alam dan budaya yang sangat baik, tetapi tetap terjebak dalam tahap awal karena kualitas tenaga kerja yang kurang memadai, pengelolaan lembaga lokal yang tidak efektif, serta akses terhadap teknologi informasi yang masih terbatas. Hambatan ini semakin berat karena cara pengelolaan tradisional yang belum



memahami pasar, sehingga produk pariwisata pedesaan sulit bersaing di tingkat internasional. Fenomena hambatan struktural ini menunjukkan bahwa sumber daya alam desa saja tidak cukup mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa adanya kebijakan publik yang dirancang dengan matang dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini berasal dari kebutuhan penting untuk menganalisis bagaimana hambatan struktural di pedesaan dapat diatasi melalui pemerintahan yang bisa beradaptasi. Administrasi negara saat ini mengatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan ekonomi di tingkat masyarakat sangat bergantung pada gaya kepemimpinan pemerintah yang mendukungnya. Studi ini berfokus pada penelitian hubungan sebab-akibat antara kebijakan pusat yang fleksibel dengan peningkatan kemampuan ekonomi nyata di daerah. Menghubungkan cara kerja pemerintahan daerah dengan kondisi ekonomi di pedesaan sangat penting untuk mencari cara terbaik dalam mengembangkan wilayah pinggiran yang berkelanjutan dan adil.

Dalam konteks kebutuhan kepemimpinan yang mampu mengubah dan memberikan dampak positif, peran Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi topik yang sangat menarik dan penting untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam menghadapi tugas di tengah krisis yang kompleks setelah pandemi, ia menerapkan gaya kepemimpinan di sektor publik yang cepat, kreatif, dan berfokus pada bisnis. Karakteristik kepemimpinan ini terlihat dari komitmen dalam menjadikan program pengembangan desa wisata sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi nasional, bukan hanya sebagai program tambahan di bidang pariwisata. Sandiaga Uno mengubah cara kerja birokrasi yang kaku menjadi sistem kerja yang bekerja sama dan bisa merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar pariwisata global.

Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana kebijakan nyata yang dipimpin oleh Sandiaga Uno berdampak efektif, terutama melalui percepatan pelaksanaan program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) serta peningkatan penggunaan teknologi digital dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta). Kebijakan ini tidak lagi melihat desa secara terpisah, tetapi menciptakan standar pengelolaan pariwisata nasional yang mencakup semua pihak. Melalui berbagai program strategis ini, kementerian berperan sebagai fasilitator yang memberikan dorongan intelektual kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di daerah agar bisa mandiri dalam mengelola manajemen mereka. Penilaian terhadap instrumen kebijakan ini penting dilakukan agar dapat melihat sampai sejauh mana visi kepemimpinan pusat berhasil disebarkan secara efektif hingga menjadi penggerak perekonomian nyata di tingkat daerah.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara ketangguhan kepemimpinan Sandiaga Uno dengan hasil nyata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan melalui jalur desa wisata. Studi ini bertujuan memberikan kontribusi teoretis dalam bidang ilmu administrasi negara, khususnya dalam hal pentingnya gaya kepemimpinan transformasional dalam menerapkan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada komunitas. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman nyata bagi para pengambil kebijakan dalam merancang model intervensi pembangunan desa yang mampu menggabungkan aspek pertumbuhan ekonomi riil,



kemandirian digital di tingkat lokal, serta pelestarian warisan budaya nasional secara berkelanjutan.

Teori Kepemimpinan Transformasional

Penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan transformasional yang diciptakan oleh Bass dan Avolio tahun 1994 sebagai alat utama untuk menganalisis. Kepemimpinan transformasional adalah gaya memimpin yang bisa membuat orang lain termotivasi, terinspirasi, dan berubah cara berpikirnya agar bisa mencapai hasil yang lebih baik dari yang diharapkan perusahaan, demi mewujudkan tujuan bersama yang lebih besar. Model ini jauh berbeda dari kepemimpinan transaksional yang hanya fokus pada balasan berupa imbalan atau hukuman. Dalam sistem pemerintahan pariwisata, diperlukan pendekatan yang mendorong perubahan untuk mengatasi cara kerja yang terlalu kaku dan tidak bisa beradaptasi dengan permintaan di tingkat internasional. Pemimpin transformasional berperan sebagai katalisator yang tidak hanya memberi perintah dari balik meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memahami harapan dan menyebarkan semangat perubahan kepada semua pihak dalam ekosistem organisasi atau masyarakat.

Bass dan Avolio (1994) mengemukakan empat dimensi inti atau komponen utama dalam kepemimpinan transformasional yang dikenal dengan nama The Four Is. Pertama adalah Pengaruh Ideal, di mana seorang pemimpin berperan sebagai agen perubahan yang memiliki karisma, integritas moral yang baik, serta menjadi contoh yang dapat dipercaya oleh para bawahannya dan masyarakat umum. Yang kedua adalah Motivasi Inspiratif, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk menyusun dan menyampaikan visi masa depan secara tegas, penuh semangat, dan menantang, sehingga mampu membangkitkan rasa semangat anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut. Dimensi ketiga adalah Stimulasi Intelektual, di mana seorang pemimpin mendorong para bawahan untuk bersikap inovatif dan kreatif, mempertanyakan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, serta berpikir tentang cara-cara yang lebih baik dan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Keempat adalah Pertimbangan Individual, yang menunjukkan kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan perhatian secara pribadi, mendengarkan kebutuhan khusus dari setiap pengikut, serta berperan sebagai mentor atau fasilitator untuk membantu mengembangkan potensi setiap orang di dalam organisasi tersebut.

Relevansi teori kepemimpinan transformasional dalam penelitian administrasi publik pariwisata terletak pada kemampuannya untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif meskipun terdapat pembatasan dalam penggunaan instrumen hukum formal. Sektor pariwisata di pedesaan membutuhkan tokoh pemimpin yang mampu melewati hambatan birokrasi yang ada dan menerima serta melibatkan berbagai pihak secara bersama-sama. Dengan memberikan dorongan berpikir secara cerdas dari para pemimpin di tingkat pusat, para pekerja di daerah dan masyarakat pedesaan diharapkan bisa berubah cara berpikirnya dari sekadar menyaksikan pembangunan menjadi pengelola destinasi yang memiliki visi masa depan. Oleh karena itu, menerapkan teori ini dalam menganalisis kepemimpinan Sandiaga Uno akan membantu memahami bagaimana kebijakan yang diambil di tingkat pusat bisa diubah menjadi tindakan



nyata di lapangan, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi yang nyata di tingkat masyarakat.

Konsep Pengembangan Desa Wisata

Konsep desa wisata perlu diintegrasikan dalam pembangunan desa secara menyeluruh, bukan hanya dianggap sebagai tempat berwisata singkat saja. Pengembangan desa wisata adalah proses merencanakan, mengatur, dan memanfaatkan semua potensi yang ada di wilayah desa termasuk alam, budaya fisik dan nonfisik, tradisi masyarakat, serta kegiatan ekonomi lokal secara terus menerus. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Konsep ini menekankan bahwa pariwisata harus tumbuh secara terpadu dengan berbagai sektor lain agar tidak hanya berkembang sebagai tempat wisata yang terpisah dan tidak tergabung dalam kehidupan masyarakat desa setempat. Fokus dari pengembangan ini adalah bagaimana kebijakan publik dapat mengubah keunikan yang dimiliki oleh desa menjadi keunggulan yang dikenal dan dihargai oleh pasar pariwisata internasional.

Berdasarkan paradigma Community-Based Tourism (CBT) yang diperkenalkan oleh Sunaryo (2013), pengembangan wisata desa yang baik harus memenuhi empat pilar keberlanjutan. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memberikan dampak langsung berupa peningkatan penghasilan, munculnya lebih banyak pekerjaan, serta memperkuat struktur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal secara adil untuk semua lapisan masyarakat. Kedua, keberlanjutan sosial-budaya yang mampu menjaga, menghormati, serta memulihkan nilai-nilai kebudayaan lokal, adat istiadat, dan identitas sosial masyarakat agar tidak terkikis oleh dampak negatif dari berkembangnya pariwisata komersial. Ketiga, keberlanjutan lingkungan yang memastikan bahwa semua kegiatan pariwisata tidak merugikan kemampuan ekosistem alam pedesaan untuk berkelanjutan, melainkan mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup. Keempat, keberlanjutan lembaga yang memperkuat kemampuan organisasi lokal, seperti Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis, serta Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, sebagai pihak utama yang mengelola tata kelola desa wisata.

Dari sudut pandang pemerintahan negara, pembangunan desa wisata menunjukkan implementasi dari kebijakan desentralisasi dalam membangun perekonomian daerah setempat. Proses pengembangan ini membutuhkan adanya pembagian tugas yang seimbang, di mana pemerintah pusat bertindak sebagai fasilitator dalam hal regulasi, pemerintah daerah bertindak sebagai penggerak program, dan masyarakat lokal sebagai pemilik sah dari modal sosial serta budaya. Keberhasilan pengembangan ini tidak dinilai berdasarkan jumlah investasi asing yang masuk, tetapi berdasarkan tingkat partisipasi aktif dan kepemilikan saham warga setempat terhadap usaha pariwisata yang berkembang di daerah mereka. Dengan menerapkan manajemen pariwisata yang ramah semua kalangan, pengembangan desa wisata berubah menjadi pusat dorong utama dalam modernisasi pedesaan, tanpa perlu menghilangkan nilai tradisi dan kebijaksanaan lokal yang dimiliki desa tersebut.

Konsep Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Peningkatan perekonomian masyarakat adalah proses yang kompleks dan melibatkan perubahan dalam bagian-bagian ekonomi individu dan kelompok masyarakat. Proses ini bisa dilihat dari peningkatan penghasilan nyata, bertambahnya peluang kerja, menurunnya jumlah



orang miskin, serta meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Peningkatan ini tidak hanya dilihat dari segi makro melalui pertumbuhan angka-angka statistik, tetapi juga harus terlihat dari indikator mikro seperti peningkatan kemampuan beli, beragamnya sumber penghasilan, dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga pedesaan. Dalam pandangan pembangunan yang menyertakan semua orang, pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan yang tidak menciptakan ketimpangan antar daerah, tetapi mampu menyebar kekayaan secara merata ke daerah-daerah yang jauh dari pusat.

Yoeti (2016) menjelaskan bahwa sektor pariwisata memiliki dampak multiplier yang sangat besar dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pengeluaran wisatawan di suatu tempat wisata tidak hanya mengalir ke pengelola objek wisata saja, tetapi juga terdistribusi ke berbagai sektor pendukung lainnya seperti penyedia penginapan (homestay), usaha makanan dan minuman lokal, industri kerajinan tangan, layanan transportasi, serta sektor pertanian yang menyediakan bahan-bahan untuk kebutuhan pangan. Aliran modal ekonomi ini membantu menggerakkan arus uang yang cepat di tingkat lokal. Ketika ekosistem pariwisata desa terhubung secara baik dengan sektor ekonomi kreatif, kemampuan masyarakat desa dalam memproduksi barang atau jasa meningkat, sehingga mereka bisa menciptakan kemandirian keuangan di tingkat keluarga maupun komunitas.

Dengan demikian, peningkatan perekonomian dalam penelitian ini diukur berdasarkan seberapa jauh kebijakan pariwisata pusat mampu mendistribusikan modal ekonomi secara inklusif kepada masyarakat pedesaan. Sektor pariwisata di pedesaan yang dikelola dengan baik berfungsi sebagai penopang ekonomi yang kuat, membantu mengurangi ketergantungan desa pada perubahan harga barang pertanian, serta secara signifikan mencegah tingkat kemiskinan struktural. Inti dari peningkatan ekonomi masyarakat setempat adalah adanya siklus pendapatan yang terus-menerus, di mana masyarakat bisa menentukan harga barang mereka sendiri dan memiliki akses ke pasar yang luas tanpa dihambat oleh tindakan tengkulak, sehingga menghasilkan kesejahteraan yang adil dan sopan bagi seluruh masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih agar bisa memahami fenomena kepemimpinan serta dampak kebijakan publik dengan lebih dalam, sesuai dengan konteks, dan tanpa menggunakan angka-angka. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis teks dan memberikan penjelasan mendalam terhadap berbagai sumber yang membahas kebijakan publik, manajemen pemerintahan, serta laporan mengenai sektor pariwisata dan ekonominya.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis data sekunder yang berasal dari buku pelajaran, jurnal ilmiah yang terindeks, laporan resmi kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, peraturan terkait, serta artikel ilmiah yang terpercaya dan relevan dengan topik penelitian tentang kepemimpinan Sandiaga Uno dan sektor ekonomi pariwisata di daerah



pedesaan. Peneliti memilih informasi dengan hati-hati agar data yang didapat benar dan dapat dipercaya.

Proses menganalisis data mengikuti model interaktif yang mencakup pengurangan data dengan menyaring informasi yang berkaitan dengan konsep revisi, penyajian data secara terstruktur melalui narasi dan tabel perbandingan, serta menarik kesimpulan. Analisis dilakukan dengan cara yang teliti untuk menghubungkan indikator dari teori kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh Bass dan Avolio dengan penerapan program pengembangan desa wisata di Indonesia, serta dampaknya terhadap indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Transformasional Sandiaga Uno dalam Pengembangan Desa Wisata di Indonesia.

Pengembangan desa wisata yang dipimpin oleh Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional benar-benar dijalankan secara nyata. Mengambil alih tugas di tengah situasi sulit akibat krisis pasca-pandemi COVID-19, Sandiaga Uno tidak memakai cara kerja birokrasi yang kaku dan formal, melainkan menggunakan pendekatan yang lebih mengejek semangat dan motivasi. Ia mengenalkan visi baru dalam sektor pariwisata yang menekankan ketahanan, inovasi, dan kemampuan untuk beradaptasi. Konsep desa wisata kembali diintegrasikan dalam kerangka pembangunan desa yang memperkuat keunikan sumber daya lokal sebagai dasar pemulihan ekonomi. Langkah transformasi ini berhasil mengubah suasana hati pesimis para pelaku industri pariwisata di daerah pedesaan menjadi suatu bentuk gerakan bersama yang fokus pada kemandirian daerah dengan memperkuat sektor pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Manifestasi dari dua dimensi kepemimpinan, yaitu Idealized Influence dan Intellectual Stimulation, yang dimiliki oleh Sandiaga Uno terlihat jelas melalui program tahunan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Melalui ADWI, dia menjadi pemimpin yang mendorong para pegawai kementerian, pemerintah daerah, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tingkat desa untuk berpikir lebih kreatif dan tidak terjebak dalam cara pengelolaan pariwisata yang biasa saja. ADWI dirancang tidak hanya sebagai acara pemberian penghargaan semata, tetapi juga sebagai alat untuk mengstandarkan kualitas destinasi pariwisata, dengan membagi desa-desa wisata ke dalam beberapa tingkat perkembangan, yaitu tahap awal, berkembang, maju, sampai mandiri. Ini mendorong masyarakat pedesaan untuk berinovasi dalam menghasilkan produk, mengidentifikasi potensi budaya yang belum terungkap, serta merancang konsep cerita wisata yang menarik dan memiliki daya jual tinggi serta bisa bersaing di pasar dalam maupun luar negeri.

Selain itu, aspek pengembangan intelektual dan pertimbangan individual juga ditingkatkan berkat peluncuran platform digital Jaringan Desa Wisata (Jadesta). Sandiaga Uno menyadari bahwa masalah utama dalam pengelolaan desa adalah terbatasnya kemampuan untuk mempromosikan desa dan kurangnya keakuratan data makro. Jadesta hadir sebagai



solusi digital yang menyeluruh, mendorong komunitas desa untuk terbiasa dengan perkembangan teknologi modern, sekaligus menjadi tempat tampilkan secara digital keindahan alam, produk kreatif, makanan khas, dan keunikan budaya yang bisa dinikmati oleh wisatawan dari seluruh dunia. Intervensi kebijakan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional yang baik dari pihak publik mampu menggabungkan semua pihak yang terlibat seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media untuk menciptakan ekosistem desa yang kuat, modern, dan mandiri secara ekonomi.

Lebih dalam lagi, dimensi Individualized Consideration dapat dilihat dari gaya kepemimpinan Sandiaga Uno yang terus-menerus melakukan kunjungan langsung ke ratusan desa wisata yang berada di berbagai daerah di nusantara. Kehadiran menteri secara langsung di lapangan mampu menghilangkan hambatan psikologis dalam birokrasi yang selama ini memisahkan pemerintah pusat dengan para pelaksana di tingkat daerah. Setiap kali berkunjung, Sandiaga Uno melakukan pembicaraan dua arah untuk mendengar secara khusus tantangan yang dihadapi oleh setiap desa wisata, mulai dari isu hak ulayat, ketidakcukupan modal, hingga hambatan dalam packaging produk UMKM. Pendekatan personal ini memungkinkan ia memberikan instruksi terkait intervensi kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat, seperti memberikan bantuan modal langsung, membantu proses sertifikasi CHSE, hingga memberikan pelatihan kepada pemandu wisata yang disesuaikan dengan karakteristik geografis desa tersebut.

Secara keseluruhan, model kepemimpinan transformasional ini berhasil mengubah peran kementerian dari sekadar lembaga pengatur yang pasif menjadi pelaku yang aktif dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan menyebar kekuatan kepemimpinan yang maju, struktur birokrasi di bawahnya terdorong untuk menerapkan prinsip kerja Gercep, Geber, dan Gaspol. Dampak jangka panjangnya adalah munculnya kesadaran baru dalam birokrasi di tingkat daerah bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak lagi diukur dari seberapa besar proyek infrastruktur fisik di perkotaan, tetapi dari seberapa tinggi kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang tersembunyi di kalangan masyarakat pedesaan.

Analisis Efek Pengganda (Multiplier Effect) Desa Wisata terhadap Perekonomian Masyarakat

Dari sudut pandang ekonomi pariwisata, keberhasilan program pengembangan desa wisata yang didorong oleh kebijakan Sandiaga Uno bisa dinilai dengan menganalisis teori efek pengganda, seperti yang dikemukakan oleh Yoeti (2016). Desa wisata tidak hanya menjadi tempat berlibur untuk menghabiskan waktu luang, tetapi juga telah berubah menjadi alat penggerak ekonomi yang inklusif, yang menyebarkan dana finansial langsung ke tingkat rumah tangga di daerah pedesaan. Ketika seorang wisatawan memilih untuk berkunjung ke desa wisata, uang yang mereka belanjakan tidak masuk ke perusahaan besar pemilik hotel mewah, melainkan langsung masuk ke sistem ekonomi kecil yang dikelola sendiri oleh penduduk setempat.

Efek pengganda berjalan sekaligus melalui tiga tingkat sirkulasi ekonomi lokal. Yang pertama adalah dampak langsung, di mana uang yang dibelanjakan wisatawan langsung



digunakan untuk bayar sewa tempat tinggal di rumah warga, jasa pemandu wisata lokal, pembelian tiket masuk ke lokasi wisata, serta pembayaran untuk pertunjukan seni tradisional yang diisi oleh para seniman setempat. Yang kedua adalah dampak tidak langsung, yaitu interaksi ekonomi tambahan antara sektor pariwisata dengan sektor pendukungnya, seperti pemilik homestay yang membeli bahan makanan segar dari petani desa, atau pengrajin lokal yang menggunakan bahan baku kayu dan bambu dari hutan rakyat di sekitar mereka. Ketiga adalah dampak lanjutan, yaitu ketika para pekerja pariwisata desa menggunakan uang gaji mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di pasar desa, sehingga pedagang warung dan pengusaha jasa lainnya juga ikut merasakan manfaat dari aliran uang tersebut.

Dampak nyata dari berjalannya rantai pasok ekonomi ini adalah adanya perluasan berbagai sumber penghasilan bagi masyarakat desa yang cukup besar. Sektor pariwisata di pedesaan berperan sebagai pelindung ekonomi yang kuat, membantu masyarakat terbebas dari ketergantungan total pada sektor pertanian yang hanya fokus pada satu jenis hasil produksi dan sangat rentan terhadap perubahan cuaca buruk serta penurunan harga komoditas di pasar luas. Pertumbuhan desa wisata secara bertahap mendorong munculnya usaha kecil dan menengah baru di sektor kuliner khas, industri fesyen yang menggunakan tenun lokal, serta kerajinan cinderamata. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang berlangsung di tingkat daerah bisa meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk membeli barang dan jasa secara nyata, mengurangi angka pengangguran yang terstruktur di wilayah tersebut, serta menjadi cara efektif untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi lokal.

Jika dianalisis lebih dalam, aliran modal yang muncul dari aktivitas desa wisata juga membantu meningkatkan kemampuan keuangan komunitas melalui lembaga ekonomi desa, seperti BUMDes. Unit-unit usaha pariwisata yang dikelola oleh desa, seperti pengelolaan wahana alam, pusat parkir yang terpadu, dan pasar kuliner, menghasilkan sebagian keuntungan yang disetorkan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan yang dikumpulkan tersebut kemudian dipakai lagi untuk mendanai berbagai program sosial di dalam desa, seperti bantuan bagi warga yang membutuhkan, subsidi untuk penyediaan fasilitas posyandu, serta perbaikan sarana ibadah di lingkungan setempat. Ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari wisata desa tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu keluarga pengelola wisata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat desa secara bersama-sama dan adil.

Akhirnya, cara kerja efek multiplier ini membantu mengurangi fenomena kebocoran ekonomi yang sering kali menjadi hambatan dalam industri pariwisata konvensional berukuran besar. Dalam pariwisata biasa, sebagian besar uang hasil keuntungan dibawa kembali ke kota atau ke luar negeri untuk membayar biaya pengelolaan hotel berbasis internasional serta bahan baku yang diimpor. Dalam struktur ekonomi desa wisata, uang diupayakan tetap berputar di dalam wilayah pedesaan sepanjang mungkin (retensi perputaran uang). Pendekatan penghematan modal lokal ini membuat model ekonomi desa wisata lebih kuat dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global, sekaligus membentuk kemandirian ekonomi di pedesaan yang berakar kuat pada kedaulatan masyarakat setempat.

Strategi Pembangunan Berbasis Komunitas (CBT) dalam Pengembangan Desa Wisata



Keberlanjutan perekonomian desa wisata sangat bergantung pada strategi pengelolaan yang tepat, di mana kebijakan yang dijalankan oleh Sandiaga Uno secara konsisten mengacu pada pendekatan Pariwisata Berbasis Komunitas atau Community-Based Tourism (CBT). Menurut Sunaryo (2013), inti dari pendekatan CBT adalah menjadikan masyarakat lokal bukan hanya sebagai pihak yang dilihat secara formal atau hanya penonton dalam proses pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku, perencana, pengelola, serta pemilik utama dari seluruh rangkaian industri pariwisata yang berkembang di wilayah mereka. Strategi ini digunakan agar penggunaan lahan di desa untuk pariwisata tidak menjadi alasan bagi investor besar untuk memperoleh pengendalian lahan, tetapi tetap berada dalam pengelolaan masyarakat adat dan warga desa.

Langkah taktis yang dilakukan oleh kementerian dalam menerapkan prinsip CBT adalah dengan memperkuat institusi lokal melalui pembentukan dan pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta bekerja sama secara aktif dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pokdarwis mendapatkan pelatihan yang cukup intensif agar bisa benar-benar memahami nilai-nilai "Sapta Pesona" yang mencakup aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Selain itu, mereka juga diberikan kemampuan dalam mengelola dan mengelola destinasi wisata secara modern. Pemerintah menyediakan berbagai program bimbingan teknis (coaching clinic) yang bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga kerja, seperti pelatihan layanan prima (hospitality), manajemen keuangan digital, teknik membungkus produk kreatif, serta cara menggunakan media sosial untuk promosi.

Dengan memperkuat organisasi lokal tersebut, masyarakat desa dapat memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam menyusun rencana tata ruang wisata mereka sendiri serta mengawasi berjalannya usaha pariwisata di wilayah tersebut. Partisipasi warga dilibatkan secara merata di berbagai bidang usaha secara demokratis, mulai dari ibu-ibu rumah tangga yang menangani penyediaan makanan di warung wisata, pemuda yang mengelola jasa transportasi untuk pengunjung alam, hingga para tokoh adat yang bertugas menjaga nilai-nilai kebudayaan dan tradisi yang sakral. Strategi CBT yang baik ini memastikan pertumbuhan ekonomi yang tercapai sejalan dengan peningkatan modal sosial, memperkuat rasa bangga terhadap budaya leluhur, serta memastikan keadilan dalam pembagian manfaat bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Selain itu, penerapan strategi CBT di bawah pengawasan Kemenparekraf berhasil mengurangi konflik antar warga desa yang sering kali muncul karena perasaan iri terhadap kondisi ekonomi. Dengan menjadikan Pokdarwis sebagai tempat berkonsultasi bersama, setiap keputusan mengenai pembagian area wisata, penentuan harga tiket, hingga pengaturan jadwal kerja pemandu wisata dilakukan dengan cara musyawarah yang terbuka dan jujur. Pola manajemen partisipatif ini memastikan semua kelompok masyarakat lokal tidak terabaikan dan bisa menikmati manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Keterlibatan yang melibatkan semua pihak secara otomatis memperkuat persatuan sosial dan rasa memiliki warga terhadap kelangsungan destinasi wisata, karena mereka menyadari bahwa keamanan dan keindahan desa berkaitan langsung dengan kestabilan pendapatan mereka.



Selain itu, penerapan CBT dalam kebijakan desa wisata mendorong munculnya inovasi produk wisata yang spesifik dan autentik, seperti wisata belajar tentang pertanian dan pelestarian upacara adat. Wisatawan kini tidak hanya menikmati pemandangan, tetapi juga membayar untuk merasakan pengalaman hidup sehari-hari seperti warga desa. Strategi ini berhasil menunjukkan bahwa melestarikan adat istiadat dan kebiasaan sehari-hari di pedesaan justru bisa menjadi barang ekonomi yang bernilai tinggi di masa kini. Dengan demikian, strategi CBT berhasil mengubah cara berpikir tentang pembangunan desa: pertumbuhan ekonomi desa tidak dicapai dengan mengekor gaya hidup perkotaan, tetapi dengan cara menjaga dan menghargai keunikan tradisi lokal yang ada.

Implikasi Sosiokultural dan Ekologis terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pengaruh kepemimpinan transformasional dalam pembangunan desa wisata tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap aspek sosiokultural dan lingkungan hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Dari segi sosiokultural, meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah pedesaan ternyata mendorong bangkitnya kembali dan pemulihan warisan budaya lokal yang hampir hilang. Kesenian tradisional, upacara adat, kerajinan tenun kuno, serta arsitektur rumah tradisional yang dulu perlahan ditinggalkan oleh generasi muda, kini kembali diminati, dipelajari, dan dijaga karena mempunyai nilai estetika serta nilai ekonomi yang tinggi di mata para wisatawan. Ini membuat masyarakat sadar bahwa merawat identitas budaya sangat penting karena merupakan aset terbaik milik desa.

Dari segi lingkungan dan ekologis, pembangunan desa wisata yang mengutamakan prinsip keberlanjutan menciptakan kesadaran baru dalam masyarakat mengenai pentingnya melestarikan alam pedesaan. Masyarakat desa menyadari bahwa menjaga hutan tetap lestari, air mata air tetap jernih, sungai tetap bersih, dan pemandangan alam tetap asri adalah hal yang penting karena dapat menarik wisatawan datang ke daerah tersebut. Karena itu, Pokdarwis bersama warga setempat sering membuat aturan adat atau peraturan desa yang melarang membuang sampah secara sembarangan, membatasi perubahan fungsi lahan hijau, serta mendorong program penghijauan lingkungan. Pariwisata berkelanjutan berhasil menyatukan kebutuhan ekonomi dengan tanggung jawab menjaga lingkungan hidup agar tetap baik untuk generasi yang akan datang.

Selain itu, pertumbuhan wisata desa terbukti menjadi faktor utama yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur fisik secara besar-besaran di daerah-daerah pinggiran. Kehadiran tempat wisata memaksa pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk memperbaiki dan mengaspal jalan raya, menyediakan air bersih yang bersih, merapikan fasilitas umum yang memadai, membuat pusat informasi wisata, hingga memperluas jaringan komunikasi dan internet tanpa kabel. Dampak positif dari perbaikan infrastruktur ini tidak hanya dirasakan oleh wisatawan yang berkunjung sementara, tetapi juga memberikan kemudahan dalam bergerak dan meningkatkan kualitas hidup sehari-hari bagi seluruh masyarakat pedesaan.

Dari sudut pandang sosiologis, interaksi antara masyarakat desa dengan wisatawan dari luar juga menyebabkan adanya perpindahan pengetahuan yang bermanfaat, sehingga memicu



perubahan positif dalam hal pengetahuan dan pemahaman. Warga desa, khususnya para pengelola wisata, diharuskan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menguasai dasar-dasar bahasa asing, serta memahami standar kebersihan dan pelayanan secara global. Proses menerapkan pengetahuan modern ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan secara nyata, tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya ketimuran yang ramah dan sederhana. Peningkatan kemampuan berpikir dan pemahaman masyarakat ini adalah bagian dari kesejahteraan yang tidak berwujud, yang sangat penting bagi kemajuan budaya desa dalam jangka waktu yang lama.

Selain itu, dampak positif terhadap lingkungan dari wisata desa terlihat dari penolakan warga terhadap kegiatan industri ekstraktif yang merusak. Misalnya, desa-desa yang sudah mendapat manfaat finansial dari sektor pariwisata ekologis biasanya lebih kuat dan berani melawan tindakan penambangan ilegal atau penebangan hutan secara besar-besaran di wilayah mereka. Kesadaran lingkungan ini berkembang menjadi gerakan advokasi ekologis yang mandiri di tingkat masyarakat. Dengan demikian, program desa wisata yang diarahkan sesuai dengan kebijakan nasional telah terbukti mampu menggabungkan dua hal yang sering kali saling bertentangan dalam pembangunan ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan riil sekaligus melindungi ekosistem bumi agar tetap utuh, demi mewujudkan keadilan antar generasi.

Tantangan Struktural dalam Mewujudkan Keberlanjutan Desa Wisata

Meskipun program pengembangan desa wisata yang dipimpin oleh Sandiaga Uno telah mencapai banyak hasil yang baik, pengecekan secara langsung di lapangan menunjukkan adanya beberapa masalah struktural yang bisa mengganggu kelanjutan program tersebut. Tantangan terbesar dan paling mendasar adalah adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia (SDM) di berbagai daerah. Banyak desa wisata di luar Pulau Jawa memiliki alam yang sangat menarik, tetapi mengalami hambatan karena kemampuan pengelola setempat dalam manajemen yang masih rendah, keterampilan berbahasa asing yang tidak memadai, serta tingkat kemampuan menggunakan teknologi digital yang masih kurang. Akibatnya, penggunaan platform digital seperti Jadesta belum berjalan dengan baik dan pengelolaan keuangan desa masih dilakukan dengan cara tradisional, sehingga rentan terhadap kesalahan dalam pengurusannya.

Tantangan struktural kedua terkait erat dengan keterbatasan aksesibilitas fisik dan koneksi infrastruktur pendukung pariwisata. Banyak desa wisata yang memiliki potensi besar, tetapi lokasinya terpisah secara geografis, terlihat dari kondisi jalan yang rusak berat, jumlah kendaraan umum yang tidak memadai, serta masih ada wilayah yang termasuk area tanpa sinyal internet. Masalah ini menyebabkan biaya untuk bepergian menjadi sangat mahal, sehingga wisatawan harus menghabiskan lebih banyak uang. Hal ini membuat minat mereka untuk berkunjung berkurang dan membuat desa wisata tersebut sulit bersaing dengan tempat wisata modern yang lebih mudah dijangkau.

Tantangan ketiga yang sangat penting adalah meningkatnya ketegangan dalam persaingan pasar yang sangat ketat antar tempat wisata yang sama, serta ancaman dari pengembangan pariwisata yang terlalu berlebihan. Tanpa adanya inovasi dan kreativitas yang



terus-menerus untuk menciptakan produk wisata yang memiliki keunikan dan keaslian, banyak desa wisata justru terjebak dalam kebosanan pasar karena hanya meniru konsep desa wisata lain yang sudah terkenal dan berhasil. Selain itu, keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial dalam waktu singkat sering kali membuat para pengelola melanggar kemampuan lingkungan untuk menampung beban (carrying capacity), hal ini jika tidak diatasi dapat menyebabkan rusaknya ekosistem alam desa, penumpukan sampah, serta hilangnya nilai kebudayaan setempat karena eksploitasi pariwisata secara berlebihan.

Analisis kritis juga menemukan bahwa ada tantangan dalam hal aturan dan tumpang tindih wewenang lembaga di tingkat daerah. Pengelolaan desa wisata sering kali menjadi titik pertemuan antara berbagai pihak, yaitu Dinas Pariwisata Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta pihak Pemdes atau BUMDes. Koordinasi yang kurang baik antar instansi sering kali memicu sikap ego masing-masing sektor, menyulitkan proses birokrasi dalam penerbitan izin, serta menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan dari pajak wisata antara pemerintah daerah dan kas desa. Hambatan regulatif ini akan menghambat kemampuan Pokdarwis untuk cepat merespons peluang investasi di bidang pariwisata yang berkembang cepat, jika tidak diselesaikan melalui kesepakatan tata kelola yang terpadu.

Akhirnya, ketidakpastian iklim global juga menjadi ancaman tersirat bagi kelangsungan hidup desa wisata yang bergantung pada atraksi alamnya. Bencana cuaca seperti longsor, banjir, dan perubahan musim yang tidak terduga dapat merusak bangunan tempat wisata dan membahayakan keselamatan para pengunjung secara tiba-tiba. Kerentanan ekologis ini membutuhkan peningkatan kemampuan mitigasi bencana dan pengelolaan krisis bagi pengelola Pokdarwis setempat. Desa wisata masa depan harus berpikir kreatif dalam hal digital dan mandiri secara ekonomi, serta harus siap menghadapi bencana agar dapat menjamin keamanan dan keberlanjutan wisata di daerah tersebut.

Analisis Integrasi Teori Kepemimpinan Transformasional dengan Keberhasilan Sektor Wisata

Hasil analisis menunjukkan hubungan linier yang signifikan antara atribut kepemimpinan transformasional Sandiaga Uno dan keberhasilan pembangunan desa wisata di Indonesia. Sandiaga Uno adalah contoh pemimpin sektor publik yang fleksibel yang berhasil menerjemahkan ide-ide teoretis dari kepemimpinan transformasional Bass dan Avolio ke dalam praktik pembuatan kebijakan yang progresif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Ia mengubah peran kementerian dari sekadar lembaga pengaturan yang kaku dan pasif menjadi peran utama dalam mendorong transformasi birokrasi pariwisata nasional ke arah yang lebih digital dan efisien.



Tabel 1. Analisis Integrasi Teori Kepemimpinan Transformasional Sandiaga Uno Terhadap Indikator Keberhasilan Sektor Wisata

Dimensi Kepemimpinan (Bass & Avolio)	Tindakan Strategis Sandiaga Uno	Indikator Capaian pada Ekonomi Desa
<i>Idealized Influence</i>	Visitasi langsung ke pelosok desa wisata, memotong jarak birokrasi, dan membangun transparansi kepemimpinan.	Kepercayaan diri pengelola lokal meningkat; kemitraan investasi dengan sektor swasta terjalin lebih kuat
<i>Inspirational Motivation</i>	Menyuarakan visi 3G (Gercep, Geber, Gaspol) serta gerakan bangga berwisata di Indonesia pascapandemi.	Komunitas desa bangkit dari krisis, aktif mengonversi potensi lokal menjadi produk wisata bernilai ekonomi.
<i>Intellectual Stimulation</i>	Digitalisasi pariwisata melalui Jadesta; standardisasi klasterisasi desa lewat kompetisi ADWI.	Pokdarwis keluar dari pola manajemen tradisional; penguasaan teknologi pemasaran digital desa meningkat pesat.
<i>Individualized Consideration</i>	Pemberian bantuan insentif modal UMKM, pendampingan tata kelola homestay, dan sertifikasi CHSE pedesaan.	Kualitas pelayanan desa terstandardisasi; kapasitas keuangan mikro rumah tangga pedesaan menguat.

Sumber: Diadaptasi dari teori Bass & Avolio (1994), dikembangkan dan diolah oleh Peneliti (2026).

Kemampuan Sandiaga Uno dalam memanfaatkan modal sosial masyarakat pedesaan secara efektif terbukti dari keberhasilannya menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam kerja sama yang melibatkan berbagai pihak. Pemimpin transformasional mengetahui bahwa pembangunan pariwisata pedesaan yang berkelanjutan tidak bisa berjalan baik hanya dengan intervensi pemerintah saja, tetapi memerlukan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak seperti dunia usaha, akademisi, masyarakat setempat, dan media. Dengan menggabungkan kebijakan yang menyertakan semua pihak, program desa wisata berhasil menciptakan agen-agen perubahan baru di tingkat dasar, seperti ketua-ketua Pokdarwis dan penggerak BUMDes. Mereka memiliki kemampuan berpikir mandiri, visi yang sama dengan pemerintah pusat, serta kemampuan berinovasi yang tinggi.

Dari segi tata kelola pemerintahan, integrasi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan publik yang bertransformasi secara efektif dapat mendorong terjadinya proses penyebaran inovasi secara luas. Kebijakan dari pusat kini tidak lagi dianggap sebagai perintah dari atas yang memaksa, tetapi sebagai kesempatan yang membuka ruang bagi kreativitas lokal dari bawah ke atas. Ini menjawab kritik yang sering diucapkan dalam bidang manajemen pemerintahan, yaitu kebijakan dari pemerintah pusat sering kali gagal karena tidak sesuai



dengan kondisi di lapangan. Dengan memberi kebebasan mengelola urusan sendiri kepada desa melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan, Sandiaga Uno berhasil membangun sistem birokrasi pariwisata yang bisa beradaptasi dan kuat menghadapi perubahan pasar global.

Dalam teori, kepemimpinan transformasional yang dilakukan Sandiaga Uno menunjukkan bahwa perubahan cara berpikir dalam kepemimpinan birokrasi di pusat dapat menciptakan dampak positif yang meluas, sehingga menggerakkan perubahan sosial dan memperkuat struktur ekonomi di tingkat daerah. Dengan pemberian rangsangan berpikir dan dorongan yang memotivasi secara terus-menerus, kini desa wisata di Indonesia tidak lagi dianggap sebagai daerah pinggiran yang tertinggal. Sebaliknya, desa wisata telah berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri, kreatif, dan berlandaskan nilai lokal, serta menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan publik yang tepat dengan kepemimpinan yang memiliki visi jangka panjang merupakan faktor utama dalam mencapai pembangunan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa cara memimpin Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan gaya transformasional berhasil memberikan dampak besar dalam mempercepat pengembangan desa wisata di Indonesia. Di tengah tekanan dari berbagai krisis setelah pandemi COVID-19, Sandiaga Uno berhasil mengubah sistem birokrasi yang biasanya kaku menjadi sistem manajemen publik yang lebih cepat, bekerja sama, dan fokus pada pasar. Melalui kebijakan-kebijakan inovatif seperti program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan Jaringan Desa Wisata (Jadesta), kementerian tidak lagi hanya menjadi pihak yang mengatur dari belakang, tetapi menjadi pihak yang membantu dan mendorong dengan memberikan pengetahuan serta standar kualitas untuk destinasi wisata. Dengan demikian, kementerian mampu membangun kesadaran bersama para aparatur daerah dan masyarakat desa untuk mengubah potensi lokal menjadi keunggulan yang bisa bersaing di tingkat internasional.

Secara makro dan mikro ekonomi, program pengembangan ini benar-benar mampu memicu dampak pengganda yang besar dalam struktur perekonomian masyarakat pedesaan. Dengan menerapkan strategi pariwisata berbasis komunitas, partisipasi aktif dari organisasi lokal seperti Pokdarwis dan BUMDes dapat membantu menjaga aliran dana tetap berada di dalam desa sekaligus mengurangi kehilangan pendapatan daerah. Aliran uang dari pengeluaran wisatawan masuk langsung ke tingkat paling dasar melalui berbagai unit usaha seperti homestay, kuliner, pemandu wisata, hingga industri kreatif sirkular. Manfaat positif ini tidak hanya membantu menambah variasi penghasilan keluarga dan menciptakan pekerjaan baru, tetapi juga memberikan dampak tidak berbentuk barang yang sangat kuat, seperti perbaikan kembali kekayaan budaya dan sosial yang hampir hilang, peningkatan fasilitas di daerah pinggir kota, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan alam desa secara mandiri.

Namun, keberlanjutan desa wisata di Indonesia dalam jangka panjang masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai



pihak. Beberapa hambatan yang tersirat, seperti ketidakseimbangan kualitas tenaga kerja antar daerah, keterbatasan akses fisik dan jaringan komunikasi (terutama di daerah-daerah terpencil di luar Pulau Jawa), risiko pasar yang terasa membosankan karena pengulangan konsep wisata yang sama, ego lembaga lokal yang terlalu kuat, hingga kerentanan lingkungan akibat perubahan iklim global masih menjadi ancaman nyata. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa keberhasilan pariwisata desa tidak hanya bergantung pada keindahan alam saja, melainkan juga pada kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah pusat yang fleksibel dengan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat lokal, demi mencapai kesejahteraan yang adil, mandiri, dan inklusif bagi masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anggita. (2023). *Kiprah Sandianga Kembangkan Desa Wisata Demi Bangkitkan Ekonomi*. Jakarta.
- Bass, B. M. (1990). *Bass and Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications* (3rd ed.). New York: Free Press.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Gulo, R., Putera, A., Panjaitan, A., & Kristen, F. I. H. (2025). Strategi Pengembangan Desa Wisata dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pariwisata*, 8(2), 1351–1360.
- Ife, J. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhayati, S., & Fandeli, C. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 15(2), 45–58.
- Nuryanti, W. (1993). *Concept, Perspective and Challenges of Tourism Village*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bass, B. M. (1990). *Bass and Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications* (3rd ed.). New York: Free Press.
- Ode, L., Pramono, D., Abdullah, A., & Jasir, B. (2024). Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Peran Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata (Studi Kasus Pemerintah Wakatobi terhadap Kelompok Sadar Wisata Desa Sombu). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11, 30–52.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yoeti, O. A. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.